

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana.
- Akhmad Fauzy. 2019. *Metode Sampling*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Aminuddin Salle. *et.al*. 2010. *Hukum Agraria*. Makassar. As Publishing.
- Bachsan Mustafa. 1988. *Hukum Agraria Dalam Presfektif*. Bandung. Remadja Karya CV.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodilogi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Graфика Perseda.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangka Education
- , 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Perkembangan Pemikiran Perkembangan Pemikiran Dan Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA Tanggal 24 September*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Irawan Soerodjo. 2021. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta. LaksBang Mediatama.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Julius Sembiring. 2016. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta. Kencana.
- Kadaruddin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang. Formaci.
- M. Arba. 2021. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Graфика.
- Moh. Hatta. 2014. *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta. Liberty.
- Moh. Muhibbin. 2024. *Penguasaan atas Tanah Timbul (aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. Jakarta. Kencana.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Graфика.

- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung. PT Refika Aditama.
- S. Chandra. 2003. *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*. Jakarta. Grasindo.
- Syamsul Efendi. 2023. *Hukum Pengadaan Tanah Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Banyumas. Amerta Media.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- . 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Tanah Satuan Rumah Susun*. Jakarta. Kencana.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Jurnal

- Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. 2021. *Problematisasi Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*. Verstek Jurnal Hukum Acara. Volume 7 Nomor 2.
- Dian Sahputra. *et.al.* 2023. *Karakteristik Pola Permukiman Di Pesisir Pantai*. Jurnal Ilmiah Teknik Unida. Volume 4 Nomor 2.
- Dwi Susiati dan Sri Setiadji. 2020. *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi*. Mimbar keadilan. Volume 13 Nomor 1.
- Eunike Syalom E. Pandey. 2019. *Kajian Yuridis Hak-Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lex Et Societatis. Volume 7 Nomor 10.
- Gita Amalia S. Aru dan Nurul Fazri Elfikar. 2023. *Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Hak-Hak Pertanahan Serta Kebijakan Agraria*. Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia. Volume 5 Nomor 4.
- Megga Marcelina Fictoria Karuntu. 2017. *Tugas dan Fungsi Kepala Kecamatan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Lex Administratum. Volume 5 Nomor 2.
- Nabila Azzahra. *et.al.* 2023, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Timbul (Studi Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Juridical Review Of The Land Rising Legal Status (Study At Dewantara Sub-District, Aceh Utara Regency)*. Buletin Konstitusi. Volume 4 Nomor 1.
- Putu Diva Sukmawati. 2022. *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Volume 2 Nomor 2.
- Ratna Nur Pratiwi. *et.al.* 2023. *Mengenal Macam-Macam Hak Atas Tanah Di Indonesia Sesuai Dengan UUPA*. Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 2.

- Reza Nur Amrin. *et.al.* 2022. *Status Hukum Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam*. Jurnal Tuntas Agraria. Volume 5 Nomor 1.
- Risti Rahmawati dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2023. *Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 9 Nomor 10.
- Vanessia Oktavia dan Tundjung Herning Sitabuana. 2023. *Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Prespektif Hukum Pertanahan Indonesia*. UNES Law Review. Volume 6 Nomor 2.
- Wahyu Ramadhani dan Ida Safitri. 2019. *Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Aceh*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 14 Nomor 2.
- Yippie Christian. *et.al.* 2019. *Iregularitas Agraria "Tanah Timbul" Dan Perubahan Lanskap di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur*. Jurnal Agraria dan Pertahanan. Volume 5 Nomor 2.
- Yoga Nuryana dan Rani Mariana. 2025. *Penegakan Hukum Dalam Pendirian Bangunan Di Tanah Sempadan Pantai Menuju Pembangunan Berkelanjutan Ditingkat Regional*. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung. Volume 2 Nomor 2.

Skripsi

- Masyithah Utrujjah Dwi Natsir. 2016. *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombang*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Muhammad Agung Stiyobudi. 2020. *Status Kepemilikan Atas Tanah (Aanslibbing) Dan Perlindungan Hukum Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Pada KBBI Daring. Diakses 13 Juni 2024. dari <https://kbbi.web.id/tanah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Pada KBBI Daring. Diakses 15 Juni 2024. dari <https://kbbi.web.id/sengketa>

https://www.pedomankarya.co.id/2021/05/ppi-beba-takalar-belum_pernah.html. Diakses pada tanggal 15 Juli 2025.